



Revisi Aturan TKDN Belanja Pemerintah/BUMN jadi Minimal 25%

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Perpres No. 46 Tahun 2025 yang merevisi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN, dan BUMD. Aturan baru ini mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25%, kecuali jika pasokan lokal tidak mencukupi. Ketentuan lebih rinci tertuang dalam Pasal 66, yang mengatur prioritas penggunaan produk lokal berdasarkan nilai gabungan TKDN dan bobot manfaat perusahaan (BMP), menggantikan aturan lama yang membolehkan langsung impor jika nilai gabungan belum mencapai 40%. Namun, Presiden menekankan pentingnya fleksibilitas dan realisme dalam implementasi TKDN agar tidak mengganggu daya saing industri nasional. Ia menginstruksikan kementerian terkait untuk mereformasi proses perhitungan TKDN agar lebih cepat, murah, dan efisien, serta membuka peluang insentif sebagai alternatif dukungan terhadap industri dalam negeri. Pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan industri lokal dengan kebutuhan efisiensi dan kompetitivitas nasional.

Revised TKDN Regulation for Government/BUMN Spending to Minimum 25%

President Prabowo Subianto officially issued Presidential Regulation No. 46 of 2025 which revises the Domestic Component Level (TKDN) policy for government, BUMN, and BUMD procurement of goods and services. This new regulation requires the use of domestic products with a TKDN value of at least 25%, unless local supply is insufficient. More detailed provisions are contained in Article 66, which regulates the priority of using local products based on the combined TKDN value and the company's benefit weight (BMP), replacing the old regulation that allowed direct imports if the combined value had not reached 40%. However, the President emphasized the importance of flexibility and realism in the implementation of TKDN so as not to disrupt the competitiveness of the national industry. He instructed the relevant ministries to reform the TKDN calculation process to make it faster, cheaper, and more efficient, as well as to open up incentive opportunities as an alternative support for the domestic industry. This approach reflects an effort to balance the protection of local industry with the need for national efficiency and competitiveness.

Dwelling Time Pelabuhan RI Turun ke 2,77 Hari, Efisiensi Logistik Meningkat

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengungkapkan bahwa waktu bongkar muat (dwelling time) impor di pelabuhan Indonesia berhasil ditekan menjadi 2,77 hari per Maret 2025, turun signifikan dari 3,52 hari pada 2024. Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara Bea Cukai, otoritas pelabuhan, dan bandara dalam meningkatkan efisiensi proses logistik nasional. Dari sisi perizinan (custom clearance), waktu pengurusan juga membaik, dengan rata-rata hanya 0,5 hari untuk impor. Sementara dari sisi ekspor, dwelling time pada 2024 tercatat mencapai 3,04 hari dengan custom clearance mencapai 0,001 hari. Perbaikan ini menunjukkan peningkatan kinerja layanan kepabeanan dan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor-impor serta memperkuat daya saing logistik nasional di tengah upaya reformasi sistem kepelabuhanan.

Indonesian Port Dwelling Time Drops to 2.77 Days, Logistics Efficiency Increases

Director General of Customs and Excise Askolani revealed that the import loading and unloading time (dwelling time) at Indonesian ports has decreased to 2.77 days as of March 2025, a significant decrease compared to 3.52 days in 2024. This achievement is the result of collaboration between Customs, port authorities, and airports in increasing the efficiency of the national logistics process. In terms of licensing (custom clearance), processing time has also improved, with an average of only 0.5 days for imports. Meanwhile, in terms of exports, dwelling time in 2024 was recorded at 3.04 days with custom clearance reaching 0.001 days. This improvement shows an increase in the performance of customs services and is an important part of supporting the smooth flow of export-import goods and strengthening the competitiveness of national logistics amidst efforts to improve the port system.

Kementerian PKP : Kuota FLPP Dipastikan Naik Menjadi 350.000

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah memastikan bahwa pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun 2025. Menteri PKP, Maruar Sirait menambahkan bahwa Kementerian PKP sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi. Menteri PKP juga memastikan terkait likuiditas untuk penambahan kuota juga telah siap. Apabila telah resmi terealisasi, maka jumlah kuota terbaru yang dialokasikan pemerintah menjadi yang paling besar sepanjang sejarah. Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menambahkan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP akan mempercepat proses usulan penambahan kuota akan selesai pada akhir Semester 1-2025. Hal demikian dilakukan untuk menambah kesempatan masyarakat dalam memiliki hunian layak.

Ministry of PKP: FLPP Quota Set to Expand to 350,000

The Ministry of Housing and Settlement has confirmed that the government will increase the quota of subsidized houses or the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) to 350,000 units by 2025. Minister of PKP, Maruar Sirait added that the Ministry of PKP is coordinating with the Ministry of Finance (Kemenkeu) to accelerate the plan to increase the quota of subsidized houses. The Minister of PKP also ensured that the liquidity for the additional quota is also ready. If officially realized, the latest quota allocated by the government will be the largest in history. Meanwhile, Commissioner of the Public Housing Savings Management Agency (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho added that he and the Ministry of PKP will accelerate the process of proposing additional quotas to be completed by the end of Semester 1-2025. This is done to increase the opportunity for people to have decent housing.

EXCHANGE RATE

	31 Desember 2024	7 Mei 2025	d-t-d (%)	m-t-d (%)	y-t-d (%)
Indonesia	16.132,00	16.536,00	-0,53	0,40	-2,50
Tiongkok	7,30	7,23	-0,12	0,60	0,98
Filipina	57,98	55,41	0,38	0,81	4,44
India	85,61	84,83	-0,47	-0,40	0,91
Korea Selatan	1.478,60	1.391,18	-0,92	2,37	5,91
Jepang	157,24	143,83	0,00	-0,55	8,53
Thailand	34,28	32,90	-0,03	1,51	4,01
Malaysia	4,47	4,24	-0,17	1,76	5,19
Singapura	1,37	1,29	0,00	0,92	5,26
EU	0,97	0,88	0,05	-0,17	8,41

STOCK PRICE INDEX

	7 May 2025	Dtd (%)	Rank	Mtd (%)	Rank	Ytd (%)	Rank
Indonesia (JCI)	6.926,23	0,41	6	2,36	2	-2,17	7
Filipina (PSEi)	6.465,45	0,73	4	1,74	6	-0,97	6
Malaysia (FTSE BM)	1.549,90	0,85	2	0,63	11	-5,63	9
Singapura (STI)	3.865,37	0,13	8	1,09	8	2,05	4
Thailand (SET 50)	1.220,27	2,73	1	1,92	5	-12,85	11
Hong Kong (HSI)	22.691,88	0,13	7	2,59	1	13,12	1
Jepang (Nikkei 225)	36.779,66	-0,14	9	2,04	3	-7,81	10
Korea (Kospi)	2.573,80	0,55	5	0,67	10	7,26	2
Tiongkok (SH Comp.)	3.342,67	0,80	3	1,94	4	-0,27	5
Amerika Serikat (DJIA)	40.829,00	-0,95	11	0,74	9	-4,03	8
Inggris (FTSE 100)	8.572,53	-0,29	10	1,24	7	4,89	3

COMMODITY PRICE

	Actual	Unit	Actual	Unit.Conv	Daily	Monthly	Yearly	Date
Crude Oil	57,95	USD/Bbl			-1,93%	-2,76%	-26,65%	May/07
Brent	60,94	USD/Bbl			-1,95%	-3,00%	-27,09%	May/07
Natural gas	3,62	USD/MMBtu			4,56%	4,36%	65,34%	May/07
Gasoline	2,02	USD/Gal			-2,49%	3,50%	-20,49%	May/07
Coal	99,40	USD/T			0,91%	1,95%	-32,20%	May/06
Gold	3.370,88	USD/t.oz			-0,88%	13,16%	45,97%	May/07
Nickel	15.555,00	USD/T			-0,86%	9,93%	-17,63%	May/07
Palm Oil	3.796,00	MYR/T			0,11%	-9,83%	-1,89%	May/07
Rice	12,64	USD/cwt	278,66	USD/T	0,29%	-6,47%	-31,45%	May/07
Soybeans	10,31	USD/Bu	378,83	USD/T	-0,41%	3,80%	-14,91%	May/07
Corn	4,41	USD/Bu	173,61	USD/T	-1,39%	-5,91%	-3,76%	May/07
Wheat	5,19	USD/Bu	190,70	USD/T	-0,10%	-3,98%	-18,22%	May/07
Sugar	17,14	Cts/pound	342,80	USD/T	-1,60%	-6,30%	-12,62%	May/07
Coffee	395,04	Cts/pound	7.900,80	USD/T	-1,15%	15,56%	97,27%	May/07
Cocoa	9.200,39	USD/T			3,82%	18,46%	9,17%	May/07
Beef	316,50	BRL/15KG			-0,92%	-2,50%	35,40%	May/06
Rubber	1,72	USD/kg			-0,06%	4,49%	5,58%	May/07



Source : Bloomberg, Bursa Efek Indonesia, Tradingeconomics, Agricultural Conversion Calculator



GLOBAL UPDATE

ASIA PACIFIC

PBoC Longgarkan Kebijakan, Suntik Likuiditas CNY 1 Triliun untuk Dorong Pertumbuhan

Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) mengumumkan pemangkasan *Reserve Requirement Ratio* (RRR) sebesar 50 basis poin pada 7 Mei 2025. Hal ini diperkirakan akan menyuntikkan likuiditas sekitar CNY 1 triliun ke sistem keuangan, sebagai langkah pertama pelonggaran RRR tahun ini. Selain itu, PBoC juga memangkas suku bunga reverse repo tenor 7 hari sebesar 10 basis poin menjadi 1,40%, pemangkasan pertama sejak September 2024, guna menurunkan suku bunga pasar dan mendorong likuiditas. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan eksternal dari meningkatnya tensi dagang dengan AS serta perlambatan ekonomi domestik. Sebagai bagian dari kebijakan stimulus, PBoC juga akan meluncurkan fasilitas pinjaman ulang sebesar CNY 500 miliar untuk konsumsi dan layanan lansia, menambah dana pinjaman teknologi sebesar CNY 300 miliar, dan memperluas dukungan pembiayaan untuk sektor pertanian serta UMKM. Kebijakan ini mencerminkan strategi proaktif Beijing dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional.

PBoC Eases Policy, Injects CNY 1 Trillion in Liquidity to Boost Growth

The People's Bank of China (PBoC) announced a 50 basis point cut in the reserve requirement ratio (RRR) on May 7, 2025. This is expected to inject about CNY 1 trillion in liquidity into the financial system, the first step in easing the RRR this year. In addition, the PBoC also cut the 7-day reverse repo rate by 10 basis points to 1.40%, the first cut since September 2024, to lower market interest rates and boost liquidity. The move comes amid external pressures from rising trade tensions with the US and a slowdown in the domestic economy. As part of the stimulus policy, the PBoC will also launch a CNY 500 billion re-lending facility for consumption and elderly services, increase the technology loan fund by CNY 300 billion, and expand financing support for the agricultural sector and MSMEs. These policies reflect Beijing's proactive strategy to maintain the momentum of economic growth and national financial stability.

UNITED STATES

The Fed Tahan Suku Bunga, Waspada Risiko Inflasi dan Pengangguran

Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,25%-4,50% untuk ketiga kalinya berturut-turut pada Mei 2025, sejalan dengan ekspektasi pasar, sembari mengambil pendekatan hati-hati di tengah kekhawatiran atas potensi dampak tarif Presiden Trump terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pernyataannya, The Fed menyoroti meningkatnya ketidakpastian prospek ekonomi serta risiko yang lebih besar terhadap inflasi dan pengangguran. Ketua Fed Jerome Powell menyatakan bahwa terlalu dini untuk menentukan risiko mana yang lebih dominan, sehingga bank sentral memilih menunggu perkembangan data sebelum mengubah kebijakan suku bunga. Meskipun data ekspor neto sempat memengaruhi indikator ekonomi, The Fed menilai aktivitas ekonomi masih tumbuh dalam laju yang solid, mendukung pendekatan kebijakan moneter yang sabar dan berbasis data.

Fed Holds Interest Rates, Watching for Inflation, Unemployment Risks

The Federal Reserve kept its benchmark interest rate unchanged at 4.25%-4.50% for the third consecutive day in May 2025, in line with market expectations, while taking a cautious approach amid concerns about the potential impact of President Trump's tariffs on inflation and economic growth. In its statement, the Fed highlighted the growing uncertainty in the economic outlook and the greater risks to inflation and unemployment. Fed Chair Jerome Powell said it was too early to tell which risks were more dominant, so the central bank preferred to wait for data developments before changing interest rate policy. Although net exports data had an impact on economic indicators, the Fed assessed that economic activity was still growing at a solid pace, supporting a patient and data-driven approach to monetary policy.

EURO ZONE

Neraca Perdagangan Perancis Masih Tercatat Defisit

Defisit perdagangan Perancis menyempit menjadi EUR6,2 M pada bulan Maret 2025 dari EUR7,7 M pada Februari 2025. Hal ini menandai defisit perdagangan terkecil dalam tiga bulan terakhir, karena ekspor naik sebesar 5,6% (mtm) menjadi EUR52,6 M, didorong oleh ekspor peralatan transportasi yang kuat (+25,3%), *plans and technical drawing* (+50%), serta seni, barang antik, dan barang koleksi (+23,2%). Pertumbuhan ekspor terlihat di semua kawasan utama, khususnya Asia (+6,9%), Timur Tengah (+5,9%), UE (+1,7%), dan Afrika (+1%). Khususnya, pertumbuhan ekspor melemah menjadi hanya 2,8% ke AS, dibandingkan dengan kenaikan 8% pada Februari, yang dipengaruhi oleh penerapan tarif AS. Sementara itu, impor tumbuh sebesar 2,3% menjadi EUR58,8 M, dengan peningkatan, hidrokarbon alami (+7,1%), dan produk agri-food (+4,3%). Secara regional, impor meningkat dari Afrika (+31,5%), Asia (+5,4%), dan Timur Tengah (+4,9%), sementara turun dari UE (-0,2%) dan Amerika (-1,2%).

France's Trade Balance Still Records a Deficit

France's trade deficit decreased to EUR6.2 M in March 2025 from EUR7.7 M in February 2025. This marked the smallest trade deficit in three months, as exports rose by 5.6% (mtm) to EUR52.6 M, driven by strong exports of transportation equipment (+25.3%), plans and technical drawings (+50%), as well as art, antiques and collectibles (+23.2%). Export growth was seen in all major regions, particularly Asia (+6.9%), the Middle East (+5.9%), the EU (+1.7%), and Africa (+1%). Notably, export growth weakened to only 2.8% to the US, compared to an 8% increase in February, which was affected by the imposition of US tariffs. Meanwhile, imports grew by 2.3% to EUR58.8 M, with increases in, natural hydrocarbons (+7.1%), and agri-food products (+4.3%). Regionally, imports increased from Africa (+31.5%), Asia (+5.4%), and the Middle East (+4.9%), while falling from the EU (-0.2%) and the Americas (-1.2%).

China 7-Day Reverse Repo Rate (%)



United States Fed Funds Interest Rate (%)



France Balance of Trade (EUR Million)

